



Katalog BPS : 1201005.1808

# RENCANA STRATEGIS

## Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

2020  
2024



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

# RENCANA STRATEGIS

Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Tulang Bawang

2020  
2024



**RENCANA STRATEGIS  
BPS KABUPATEN TULANG BAWANG 2020-2024**

**ISBN 978-623-7714-14-9**

**No. Publikasi : 18081.2007**

**Katalog BPS : 1201005.1808**

**Ukuran Buku : cm**

**Jumlah Halaman : xiii + 93 Halaman**

**Naskah :**

SubBagian Tata Usaha  
BPS Kabupaten Tulang Bawang

**Gambar Kulit :**

BPS Kabupaten Tulang Bawang

**Diterbitkan oleh :**

BPS Kabupaten Tulang Bawang

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

---

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Tulang Bawang periode 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Tulang Bawang. Renstra ini digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu terhadap Renstra BPS yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2015- 2019 . Selain hal tersebut penyusunan Renstra juga didasarkan pada analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2020-2024. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing seksi di lingkup BPS Kabupaten Tulang Bawang secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam pelaksanaannya, muatan dalam Renstra dapat dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan BPS yang tertuang dalam Renstra BPS 2020-2024.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang 2020-2024. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Menggala , 20 Juli 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Tulang Bawang,



**Gunawan Catur Prasetyo SST, M.Si.**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Kabupaten Tulang Bawang telah merumuskan 4 pernyataan misi, yakni : (1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; (2)

Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatkan kolaborasi, integrasi,

dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; (3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam Rencana Strategis BPS 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) penyediaan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; (2) pembinaan K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; (3) pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan (4) pembangunan SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang 2020-2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK.....	15
2.1 Visi BPS.....	18
2.2 Misi BPS.....	19
2.3 Tujuan BPS.....	22
2.4 Sasaran Strategis BPS.....	25
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS.....	36
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	57
4.1 Target Kinerja.....	57
4.2 Kerangka Pendanaan.....	60
BAB V. PENUTUP.....	63





## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tulang Bawang Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%) .....	5
Tabel 2. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2020-2024.....	20
Tabel 3. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024 .....	24
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tulang Bawang.....	26
Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 - 2024 .....	58
Tabel 6. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024 .....	61



## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Jenis Layanan yang Digunakan di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang.....	3
Gambar 2. Tingkat Kepuasan Konsumen menurut Dimensi Kualitas Data di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang.....	3
Gambar 3. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS Kabupaten Tulang Bawang.....	4
Gambar 4. Keterkaitan Misi dan Arahannya Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan .....	16
Gambar 5. Peta Strategi Badan Pusat Statistik 2020-2024 .....	27
Gambar 6. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik	42



# BAB I. PENDAHULUAN

---

BPS Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Tulang Bawang perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government di Indonesia.

BPS Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan tugas selama lima tahun, dipandu dan berdasarkan Renstra BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024, yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Muatan Renstra BPS yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPS dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Substansi pada Renstra BPS 2020-2024 harus disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024, termasuk sasaran pokok RPJMN 2020-2024 yang terintegrasi menjadi sasaran Renstra BPS. Oleh karena itu, sasaran dan target pembangunan pada Renstra BPS telah mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra 2015-2019.

## **1.1 Kondisi Umum**

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya.

Pencapaian umum visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, hingga tahun 2019, dapat dilihat dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019. Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2019 adalah konsumen yang pernah menerima pelayanan dari unit

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS baik yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, surat, layanan online, dan lain-lain.



**Gambar 1. Jenis Layanan yang Digunakan di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang**

Berdasarkan data hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2019, diketahui bahwa layanan yang paling banyak dikases oleh konsumen adalah Layanan Perpustakaan Tercetak dan Layanan Konsultasi Data Statistik. Bila dilihat dari sisi kualitas data BPS, hasil SKD 2019 menunjukkan bahwa sebesar 100 persen konsumen merasa puas dengan data yang disediakan oleh BPS Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap aspek kualitas Data. (Gambar 2.)



**Gambar 2. Tingkat Kepuasan Konsumen menurut Dimensi Kualitas Data di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang**



Dari sisi pelayanan data BPS, persentase konsumen yang puas dengan pelayanan PST BPS Kabupaten Tulang Bawang mencapai 100 persen, terutama atas sikap petugas PST saat memberikan pelayanan. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS sebesar 100 persen. Dan dari sisi pemenuhan sarana dan prasarana, ada 100 persen konsumen yang merasa puas dengan pemenuhan sarana prasarana BPS (Gambar 3). Sedangkan untuk seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS ditunjukkan dengan angka Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) yang sebesar 80,96. IKK memperhitungkan antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang dirinci dalam 12 (dua belas) atribut pelayanan.



**Gambar 3. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS Kabupaten Tulang Bawang**

Capaian kinerja BPS Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode Renstra BPS 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja BPS Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut :

**Tabel I. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Kabupaten Tulang Bawang Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%)**

<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Peningkatan kualitas data statistik	99,41	99,41	104,17	103,18	95,09
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	99,41	99,41	102,64	104,05	95,09
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	99,14	112,35	104,17	102,57	113,14
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	99,14	111,16	108,47	101,29	113,14
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	-	-	100	100	120,00
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	-	-	100	100	120,00
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	98,48	98,48	96,21	94,21	103,00
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	103,44	103,44	100,13	98,75	103,00
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	-	-	-	-	-

Dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak 2015, capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran cenderung bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun dengan capaian tujuan di tahun 2019 merupakan yang tertinggi sejak lima tahun terakhir, sedangkan di tahun 2015 merupakan yang paling rendah.

Jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan khususnya pada indikator yang digunakan. Perubahan tersebut merujuk kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Secara garis besar, hampir seluruh sasaran pada tujuan empat telah melampaui angka 100 persen khususnya selama tiga tahun terakhir. Meskipun sempat terjadi penurunan pada keempat sasaran, namun di akhir tahun 2019 BPS mampu mempertahankan nilai capaian di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPS untuk tujuan empat dapat dikatakan baik.

Terkait dengan kebijakan pembangunan di bidang statistik BPS tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk menjadikan BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, pembangunan di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik yang datang dari instansi pemerintah, usahawan, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian. Ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, BPS telah melaksanakan berbagai aktivitas sensus maupun survei yang meliputi kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan periodik, dan prioritas nasional. Hasil dari pelaksanaan sensus dan survei tersebut, dihasilkan indikator strategis nasional yang digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional, antara lain :

1. Inflasi, yang dirilis setiap bulan, bermanfaat menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Tingkat inflasi ditentukan dari IHK, yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
2. Pertumbuhan ekonomi, dihasilkan setiap triwulan. Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB atas dasar harga konstan. PDB harga konstan (riil) dapat

digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Persentase penduduk miskin, dihasilkan setiap semester. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dihasilkan setiap semester. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
5. Gini rasio, dihasilkan setiap semester. Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dihasilkan setiap tahun. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), serta dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain indikator strategis di atas, telah dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

1. Indeks Kemahalan Wilayah (IKW) disusun BPS bekerjasama dengan KemenPAN RB. IKW dapat menggambarkan tingkat kemahalan barang dan jasa di suatu wilayah. Tujuannya sebagai dasar penghitungan untuk membayar Tunjangan Kemahalan kepada PNS berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
2. Penyediaan 136 indikator SDGs dari 319 indikator, yang terdiri atas 97 indikator murni yang dihasilkan oleh BPS, dan 39 sisanya merupakan hasil kolaborasi dengan K/L lainnya. dari 97 indikator yang murni dihasilkan BPS, terdiri atas 64 indikator masih berupa proksi indikator global, sementara 33 sisanya telah berupa indikator standar global. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan tujuan utama mengukur kebahagiaan penduduk Indonesia dengan pendekatan kepuasan hidup (kesejahteraan subjektif);
3. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), berkaitan dengan PP No. 55/2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dan tuntutan presiden untuk menyediakan indikator pengukuran sebagai upaya pendidikan dan budaya anti korupsi;
4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015, bertujuan mengumpulkan data komponen indeks demokrasi dan menghitung IDI;
5. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015), merupakan kegiatan nasional yang dilakukan berdasarkan amanat Inpres RI No. 7/2014 bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap basis data terpadu rumah tangga yang kondisinya dianggap sudah mengalami perubahan karena dikumpulkan pada tahun 2011;
6. SE2016 bermanfaat untuk melihat potensi ekonomi sektor riil, baik output, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dalam negeri atau impor, dan penyerapan tenaga kerja, serta untuk meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, SE2016 juga akan bermanfaat bagi pengguna data khususnya dunia usaha karena

dapat dijadikan dasar perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar, dan potensi pasar;

7. Pendataan Potensi Desa (Podes 2018) yang bermanfaat untuk menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah;
8. Penyusunan Disagregasi PMTB menurut Institusi dan Lapangan Usaha yang bermanfaat untuk Memperoleh data PMTB menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi;
9. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), merupakan kegiatan survey periodik tiap lima tahun setelah pelaksanaan Sensus Penduduk yang bertujuan untuk dapat memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, menyediakan data karakteristik kependudukan dan penghitungan parameter demografi, serta sebagai koreksi terhadap hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035;
10. Inter Regional Input Output memberikan gambaran ekonomi regional untuk mengetahui keterkaitan hulu dan-hilir inter- regional tersebut dan mengidentifikasi kekuatan produk yang dapat mendukung aliran produksi global,
11. Survei E Commerce untuk memperoleh gambaran transaksi dan potensi usaha e-commerce dari sudut pandang pelaku usaha maupun pengguna jasa e-commerce
12. Survei Wisatawan Nusantara Memperoleh data jumlah perjalanan wisnus, baik dari provinsi/kabupaten asal, maupun provinsi/kabupaten tujuan yang telah menggunakan Mobile Positioning Data (MPD);
13. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes Mini) menyediakan data untuk evaluasi alokasi Dana Desa;

14. Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menyediakan data luas panen dan fase pertumbuhan padi dengan menggunakan peta geospasial dan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan untuk mendapatkan angka produktivitas tanaman pangan yang keduanya akan menghasilkan angka produksi padi/tanaman pangan; dan
15. Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018) merupakan Survei Pertanian yang dilaksanakan untuk menjembatani data Sensus Pertanian 2013 dan Sensus Pertanian 2023, merupakan pencacahan dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai perkiraan jumlah rumah tangga pertanian, baik rumah tangga pertanian pengguna lahan maupun rumah tangga bukan pengguna lahan, termasuk rumah tangga petani gurem, dan luas lahan yang dikuasai/diusahakan.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi yang Dimiliki**

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, dengan memegang prinsip kerahasiaan data responden dalam setiap proses bisnis statistik.

Potensi BPS yang diharapkan dapat menjadi booster transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam Program STATCAP CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics).

Dari peta potensi dan permasalahan dalam menghasilkan kualitas data tersebut, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka mewujudkan Renstra BPS, antara lain :

- a) Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2019 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Pusat yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBPN yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.
- b) Walaupun masih sebagian kecil konsumen di PST BPS Kabupaten Tulang Bawang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 46,67 (Hasil SKD 2019, namun diharapkan tidak mengurangi tingkat kepercayaan pengguna terhadap data BPS.
- c) BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasinya berkembang cukup pesat. Sensus Penduduk 2020 yang menjadi pekerjaan periodik dan utama BPS pun menerapkan pemanfaatan *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)* dalam pendataannya.



d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

### **1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi**

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang

tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada output yang dihasilkan guna mencapai outcome yang diharapkan. Hal ini berpengaruh pada kualitas data yang berimbas pada tingkat kepuasan pelayanan terhadap pengguna data. Sebagai lembaga yang mempunyai visi “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”, diharapkan selalu meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kantor modern yang berprinsip money follow program yang berorientasi outcome.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan yang bersumber dari eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Persentase response rate atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Meskipun mengalami peningkatan capaian menjadi 98,51 persen pada triwulan IV tahun 2019, dibandingkan dengan pada tahun 2018 yang hanya 98,48 persen, namun masih belum pernah mencapai 100 persen.

Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Tulang Bawang dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

## **BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK**

---

RPJMN 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan RPJPN 2020 – 2025. Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005 – 2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yaitu:

### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama mencakup:

#### **I. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

## 2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

## 3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

## 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

## 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 4. Keterkaitan Misi dan Arahan Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan dalam penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar 4.

7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024, sebagai berikut :

1. PN\_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;  
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. PN\_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
3. PN\_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;  
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. PN\_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;  
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. PN\_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. PN\_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. PN\_7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dalam melaksanakan RPJMN 2020 – 2024 serta seluruh Visi, Misi, Arah, dan Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, antara lain:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

## 2.1 Visi BPS

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

BPS Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas menyelenggarakan statistik dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan visi Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024 yaitu :

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

*(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)*

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

## **2.2 Misi BPS**

BPS Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan misi Badan Pusat statistik dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah



**Tabel 2. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2020-2024**

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	<b>MISI BPS 2020 – 2024</b>
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- I. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional  
 Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).  
 ... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar

internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

## 2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

## 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

### 2.3 Tujuan BPS

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamankan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan

Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah :

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:  
Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:  
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:  
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:  
Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

**Tabel 3. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024**

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyediakan statistic berkualitas yang berstandar nasional dan inetrnasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
	2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	
	3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi

statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap- Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia.

## **2.4 Sasaran Strategis BPS**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program- program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, artinya seluruh Program KL harus mengikuli

arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS 2020-2024 termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

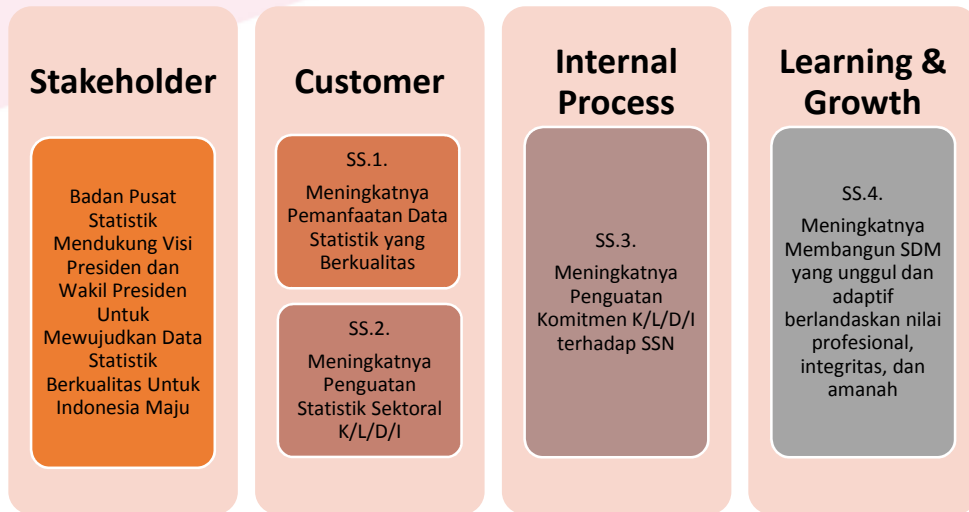
Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Tulang Bawang**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan

dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



**Gambar 5. Peta Strategi Badan Pusat Statistik 2020-2024**

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain :

#### I. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan :

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator :
  - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
  - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei



- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator :
  - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
  - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
  - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
  - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
  - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
  - vi. Membuat customer relationship management
  - vii. Menyusun data mining pengguna data
  - viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
  - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
  - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :
  - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
  - ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
  - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
  - iv. Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
  - v. Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator :
  - i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
  - ii. Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
  - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
  - iv. Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
  - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator :
  - i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
  - ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

## 2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”.

Dengan indikator sasaran :

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah “ Penguatan statistik sektoral K/L/D/I’.

Dengan indikator sasaran : Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

## 3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”.

Dengan indikator sasaran :

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

#### 4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”.

Dengan indikator sasaran :

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

### **Nilai-Nilai Inti BPS**

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

- Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut :

### 1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten, mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif, memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien, mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif, selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik, meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

### 2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi, memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. Disiplin, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten, selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Terbuka, menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. Akuntabel, bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

### 3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- b. Jujur, melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- c. Tulus, melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Adil, menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

## **BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

---

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,  
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial
  - b. Produktivitas
  - c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Infrastruktur pelayanan dasar
  - b. Infrastruktur ekonomi
  - c. Infrastruktur perkotaan
  - d. Energi dan ketenagalistrikan
  - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Pendekatan Omnibus Law, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya
  - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Penyederhaan prosedur
  - b. Penyelenggaraan E-Government

- c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
- a. Industrialisasi
  - b. Pengembangan destinasi unggulan
  - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS. Selain major project yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

### **Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS**

#### **1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020**

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

#### **2. Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)**

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan

Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. Passenger Exit Survey (PES), Penyusunan Tourism Satellite Accounts (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik E-Commerce  
Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan E-Commerce. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)  
Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

### **Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS**

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L



terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
  - a) Menghimpun data statistik politik dan keamanan.
  - b) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu.
  - c) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
  - a) Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.
  - b) Mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
  - a) Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
  - b) Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
  - c) Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS**

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 –

2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
- ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;

- b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan

- c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- iv. Membuat customer relationship management;
- v. Menyusun data mining pengguna data;
- vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
- vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;

- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;

- c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien. Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
  - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;  
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
  - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
  - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
  - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
  - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
  - iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
  - v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;  
Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
  - i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
  - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

## 6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:

- i. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
- ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu :

### **3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan**

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), konsisten (koheren), mudah di

interpretasi (interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

### **3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS**

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024

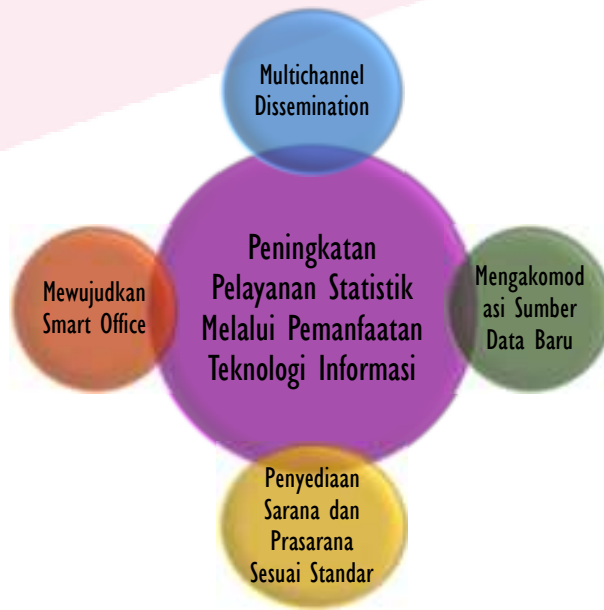
karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

### **3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS**

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



**Gambar 6. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik**

*Interlink* antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping dan reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur

yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020- 2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrasturktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing- masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut :



## I. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatnya akurasi data, melalui :
  - i. Integrasi proses bisnis; serta
  - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan :
  - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
  - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
  - iii. Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

## 2. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
  - b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
  - c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
  - d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK
3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan :

*Pertama*, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

*Kedua*, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

*Ketiga*, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I

b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

#### 4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan :

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
  - ii. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
  - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :
  - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
  - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
  - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
  - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
  - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
  - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
  - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :
  - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
  - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional

- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
  - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
  - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
  - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
  - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
  - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - i. Merumuskan *grand design smart office*
  - ii. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

I. Program Dukungan Manajemen/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta

d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

## 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan :

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;

- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

#### **3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan**

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

##### **a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina

statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah :

- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
- iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
- iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah



tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

#### d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (value) yang dirasakan oleh pengguna

data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi penguatan transformasi digital terdiri dari (i) aspek penguatan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti big data, mobile computing, artificial intelligence, dan Internet of Things, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

### **3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi COVID-19**

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S- 302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42 persen.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.

4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.



## **BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

---

### **4.1 Target Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja  
BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 - 2024**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	60	60	60	60	60	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100	100	100	100	100	Sosial, Produksi, Distribusi, Nerwilis
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	-	-	-	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sectoral dan khusus sesuai standar (%)	50	50	50	50	50	IPDS
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	17	17	17	34	34	Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
<b>4.</b>	<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>							
	SDM Statistik yang unggul dna berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	62	63	64	65	66	Tata Usaha

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	90	90	90	90	90	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut :

### I. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (Outcome):

#### **Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- c) Progress pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (Outcome):

#### **Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

Sasaran Program (Outcome):

#### **Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS
- b) Jumlah satker yang menerapkan smart office



- c) Dokumen grand design smart office

## 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (Outcome):

### **Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (Outcome):

### **Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (Outcome):

### **Penguatan statistik sektoral K/L/D/I**

Dengan Indikator Kinerja Program :

Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan

dan sasaran strategis BPS Kabupaten Tulang Bawang selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 – 2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang</b>	<b>11,816.34</b>	<b>7,033.28</b>	<b>5,172.83</b>	<b>4,970.61</b>	<b>5,354.11</b>
<b>054.01.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS</b>	<b>3,279.10</b>	<b>3,589.60</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,735.80</b>	<b>3,887.10</b>
Kegiatan 2886. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	3,279.10	3,589.60	3,900.00	3,735.80	3,887.10
<b>054.01.06. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>8,537.24</b>	<b>3,443.68</b>	<b>1,272.83</b>	<b>1,234.81</b>	<b>1,467.01</b>
Kegiatan 2897. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	38.78	40.60	42.00	43.50	45.00
Kegiatan 2898. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	26.18	27.90	30.10	32.40	34.70
Kegiatan 2899. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	9.77	10.40	10.80	11.30	11.70
Kegiatan 2900.0Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	19.02	20.48	21.43	22.41	23.41
Kegiatan 2902. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	9.81	11.20	11.60	11.90	12.30

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 2903. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	34.00	35.20	36.40	37.70	33.30
Kegiatan 2904. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	35.65	41.10	44.50	47.90	51.30
Kegiatan 2905. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	7,720.68	2,418.80	272.50	280.70	317.10
Kegiatan 2906. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	290.80	313.30	398.10	338.60	353.00
Kegiatan 2907. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	35.38	182.50	49.80	39.20	202.30
Kegiatan 2908. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	14.02	15.70	17.20	18.70	20.20
Kegiatan 2909. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	3.59	3.70	3.80	4.00	4.10
Kegiatan 2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	299.55	322.80	334.60	346.50	358.60

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel.

## BAB V. PENUTUP

---

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh

kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

**Lampiran I. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	I. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional	I. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	I. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	I. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	a) Meningkatnya akurasi data.	DMPTL dan PPIS
			IKSS 1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)		b) Memastikan ketuntasan data.	
			IKSS 1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)		c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.	
					d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.	
					e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE	
					f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral	
					g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.	
					h) Memastikan penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia	

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)
	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan	2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	<p>2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN</p> <p>IKSS 2.1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)</p> <p>IKSS 2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)</p>	1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	<p>a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional</p> <p>b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral</p> <p>c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK</p>	
	3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional	3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	<p>3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I</p> <p>IKSS 3.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)</p>	<p>1. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN</p> <p>2. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.</p>	<p>menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).</p> <p>a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN</p> <p>b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.</p>	

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)
				3. Arah kebijakan penyediaan statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I</li> <li>b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik</li> </ul>	
	4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;		
IKSS 4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat			2. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis</li> </ul>		
IKSS 4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)				<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)</li> <li>iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai</li> </ul>		
			3. Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai</li> <li>ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian</li> </ul>		



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM</li> <li>iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian</li> <li>v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)</li> <li>vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family</li> <li>vii. Talent pool untuk suksesi organisasi</li> </ul>	
				4. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional</li> <li>ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional</li> </ul>	
				5. Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)</li> <li>ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				6. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja.	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.	
				7. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.	
				8. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.	
					ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	
				9. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	
					ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai	
				10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai	i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan</li> <li>iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem</li> </ul>	
				11. Pewujudan Smart Office di BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Merumuskan grand design smart office</li> <li>ii. Implementasi smart office di BPS</li> </ul>	

Lampiran 2. Tabel Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>BPS Kabupaten Tulang Bawang</b>							11,816.34	7,033.28	5,172.83	4,970.61	5,354.11	
<b>SS.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>												
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	60	60	60	60	60						IPDS
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100	100	100	100	100						Sosial, Produksi, Distribusi, Nerwilis
<b>SS.2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>												
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	-	-	-						IPDS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	50	50	50	50	50						IPDS
<b>SS.3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	17	17	17	34	34						Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
<b>SS.4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>												
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	62	63	64	65	66						Tata Usaha
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	90	90	90	90	90						Tata Usaha
<b>PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen</b>							<b>3,279.10</b>	<b>3,589.60</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,735.80</b>	<b>3,887.10</b>	<b>Tata Usaha</b>
<b>Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>												
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	-	-	-	-	-						
<b>Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS</b>												
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	62	65	68	70	72						
<b>Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard</b>												
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	100	100	100						
<b>2886. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</b>							<b>3,279.10</b>	<b>3,589.60</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,735.80</b>	<b>3,887.10</b>	<b>Tata Usaha</b>
<b>Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>												
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	-	-	-	-	-						
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	-	-	-	-	-						
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	-	-	-	-	-						
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	-	598.7	-	-	-						
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	-	-	-	-	-						
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik</b>												
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	20	20	20	20	20						
<b>Layanan Perkantoran</b>												
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>							8,537.24	3,443.68	1,272.83	1,234.81	1,467.01	Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
	<b>Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>											
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	60	60	70	70	70						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100	100	100	100	100						
	<b>Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>											
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	50	50	50	50	50						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	-	-	-						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)	10	10	10	10	10						
<b>Penguatan statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)	-	-	-	-	-						
<b>2897. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik</b>							<b>38.78</b>	<b>40.60</b>	<b>42.00</b>	<b>43.50</b>	<b>45.00</b>	<b>IPDS</b>
<b>Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</b>												
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	6	6	6	6	6						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	6	6	6	6	6						
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	-	-	-	-	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	-	-	-	-	1						
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	-	-	-	1	1						
<b>Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>												
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	72	80	84	88	90						
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	90	92	92	92	92						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	5,739	5,839	5,939	6,039	6,139						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	-	-	1	1	1						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	80	81	82	83	85						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	90	90	90	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2898. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran</b>							<b>26.18</b>	<b>27.90</b>	<b>30.10</b>	<b>32.40</b>	<b>34.70</b>	<b>Nerwilis</b>
<b>Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas</b>		4	4	4	4	4						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)	95	95	95	95	95						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2899. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi</b>							<b>9.77</b>	<b>10.40</b>	<b>10.80</b>	<b>11.30</b>	<b>11.70</b>	<b>Nerwilis</b>
<b>Tersedianya data Neraca Produksi yang berkualitas</b>												
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%)	95	95	95	95	95						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis framework terintegrasi seperti SUT (%)	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2900.Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei</b>							<b>19.02</b>	<b>20.48</b>	<b>21.43</b>	<b>22.41</b>	<b>23.41</b>	<b>IPDS</b>
<b>Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna</b>												
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	-	-	-	-	-						
	Persentase data SBR yang terupdate (%)	-	-	-	-	-						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	-	-	-	-	-						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	1	1	1	1	1						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	0	0	0	0	0						
	Persentase subject matter yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%)	-	-	-	-	-						
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
<b>2902. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi</b>							<b>9.81</b>	<b>11.20</b>	<b>11.60</b>	<b>11.90</b>	<b>12.30</b>	<b>Distribusi</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas</b>		3	3	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2903. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga</b>							<b>34.00</b>	<b>35.20</b>	<b>36.40</b>	<b>37.70</b>	<b>33.30</b>	<b>Distribusi</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas</b>		2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi	-	-	-	-	-						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2904. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi</b>							<b>35.65</b>	<b>41.10</b>	<b>44.50</b>	<b>47.90</b>	<b>51.30</b>	<b>PRODUKSI</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas</b>		5	5	5	5	5						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	5	5	5	5	5						
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	-	-	-	-	-						
<b>2905. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b>							<b>7,720.68</b>	<b>2,418.80</b>	<b>272.50</b>	<b>280.70</b>	<b>317.10</b>	<b>SOSIAL</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas</b>		3	3	3	3	3						
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2906. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat</b>							<b>290.80</b>	<b>313.30</b>	<b>398.10</b>	<b>338.60</b>	<b>353.00</b>	<b>SOSIAL</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas</b>												
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2907. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial</b>							<b>35.38</b>	<b>182.50</b>	<b>49.80</b>	<b>39.20</b>	<b>202.30</b>	<b>SOSIAL</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas</b>		2	2	2	2	2						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2908. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata</b>							<b>14.02</b>	<b>15.70</b>	<b>17.20</b>	<b>18.70</b>	<b>20.20</b>	<b>Distribusi</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas</b>		3	3	3	3	3						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2909. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan</b>							<b>3.59</b>	<b>3.70</b>	<b>3.80</b>	<b>4.00</b>	<b>4.10</b>	<b>Produksi</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas</b>												
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	-	-	-	-	-						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						
<b>2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>							<b>299.55</b>	<b>322.80</b>	<b>334.60</b>	<b>346.50</b>	<b>358.60</b>	<b>Produksi</b>
<b>Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas</b>		3	3	3	3	3						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	76	77	78	79	80						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						
<b>Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I</b>												
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	-	-	-	-	-						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	-	-	-	-	-						



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

*Enlighten The Nation*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Jl. Cemara No.285 Gunung Sakti, Menggala Selatan  
Menggala, Tulang Bawang 34617

Telp: (0726) 7575406, Fax: (0726) 7575407

Homepage: <https://tulangbawangkab.bps.go.id>, E-mail: [bps1808@bps.go.id](mailto:bps1808@bps.go.id)

ISBN 978-623-7714-14-9



9 786237 714149